



---

# Laporan Keanggotaan PT. Hatindo Makmur dalam Seafood Savers

---

Ringkasan perkembangan perbaikan perikanan  
oleh PT Hatindo Makmur periode Juli –  
Desember 2015

---

Muhammad Maskur Tamanyira – Seafood Savers  
Officer

---

## Informasi Umum

- Lokasi** : Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Sendangbiru, Kabupaten Malang, Jawa Timur  
Survey pertama : April 2015  
Jumlah petambak/nelayan : Total Armada Kapal yang secara aktif terdata menjadi rantai produksi PT. Hatindo bekerjasama dengan adalah sebanyak **44 Armada** jenis sekoci. Yang keseluruhan armadanya telah didaftarkan ke DKP Provinsi Jawa Timur

- Praktik Penangkapan**

- Ukuran minimal panen/tangkap (nama komoditas) : Juvenil tuna sirip kuning, sekitar 10-15 Kg (berat tidak baku, karena ikan tidak ditimbang satuan jika ukurannya tidak mencapai 20 Kg)
- Metode penangkapan : Pancing Ulur, dengan armada tangkap 5-17 GT
- Kisaran harga beli : Rp. 15.000 – 50.000/ Kg

*Di Sendangbiru, perikanan yang menjadi komoditas adalah Tuna, salah satunya jenis Tuna Sirip Kuning atau madidihang (Thunnus albacares). Ditangkap dengan pancing ulung (Handline) jenis ikan ini menjadi target utama pengimpor, yang berdatangan dari wilayah sekitar. Proses transaksi ikan hasil tangkapan dilakukan dengan cara lelang, yang diselenggarakan oleh Kantor Unit Pengelola Pelabuhan setempat.*

- Kapasitas produksi**

*Secara umum, produksi tuna di Sendangbiru di tahun 2012 total produksi ikan yang didaratkan di PPP Pondokdadap mencapai 5.273,27 ton dengan nilai Rp 55.244.988.963. Produksi tuna, cakalang dan tongkol sebesar 3.378,55 ton atau mencapai 64,06% dari total produksi ikan yang didaratkan di PPP Pondokdadap. Adapun jenis tuna yang tertangkap antara lain madidihang (Thunnus albacares), tuna mata besar (Thunnus obesus) dan albakora (Thunnus alalunga) yang mencapai 1.012,10 ton (19,19%), sedangkan cakalang (Katsuwonus pelamis) sebesar 600,81 ton (11,39%) dan tongkol mencapai 1.765,64 ton (33,48%) (PPP Pondokdadap, 2012 dalam laporan Tahunan LOKA Tuna Bena 2013).*

*Berdasarkan informasi yang disampaikan, PT. Hatindo Makmur memanfaatkan sebesar 164.794 Kg madidihang dari Sendangbiru. Besaran ini diperoleh dari aktivitas pembelian pada periode April hingga Agustus tahun 2015.*

#### 4. **Keterangan tambahan**

PT. Hatindo Makmur dan PT. 168 Bena bekerja sama dalam skema Seafood Savers dan mengupayakan perbaikan perikanan tuna secara bersama-sama di Sendangbiru.

Pada bulan September 2015, PT. Hatindo Makmur melaporkan perubahan jumlah armada yang berada dibawah rantai produksi mereka. Selain itu, disampaikan juga jumlah tangkapan yang dibeli oleh PT. Hatindo Makmur dari sendangbiru. Sebuah tindakan yang harus diapresiasi. Pelaporan berkala semacam ini, menjadi penting untuk pemantauan perbaikan FIP ke depannya.

Informasi perubahan (penambahan armada) dari PT. Hatindo Makmur (yang diberikan **tanda kuning** merupakan armada yang baru didaftarkan selaku rantai perdagangan perusahaan per September 2015):

<b>LIST KAPAL PT. HATINDO MAKMUR</b>	
<b>NO.</b>	<b>NAMA KAPAL</b>
1	BISFALA 03
2	BINTANG SURYA 02
3	BINTANG KEJORA 01
4	BINTANG KEJORA 07
5	ANTARIKSA 04
6	BINTANG KEJORA 06
7	ISTANA LAUT 03
8	BITUNG RAYA 01
9	SIMPATI 01
10	BISFALA 06
11	MEGA ABADI 01
12	BERKAH JAYA 03
13	SUMBER ALAM 04
14	BISFALA 5
15	BISFALA 8
16	BINTANG TIMUR 04
17	BALAS BUDI 19
18	BERKAH ALAM
19	TUNGGAL JAYA 03

20	DARWIS 03
21	TUNGGAL JAYA 11
22	ISABELLA 02
23	DARWIS 02
24	CAHAYA MURNI
25	CIPTO
26	BISFALA 012
27	KUDA LAUT
28	DUA PUTRI
29	KARYA MINA
30	TUNGGAL JAYA 05
31	AGUNG MANDIRI
32	BISFALA 9
33	BINTANG SURYA 04
34	DEWA RUCI 01
35	BISFALA 7
36	CAHAYA NIKMA 8
37	CAHAYA NIKMA 4
38	MEGA ABADI 02
39	BITUNG RAYA 02
40	BERKAH JAYA 02
41	BINTANG SURYA 3
42	BISFALA 011
43	BITUNG RAYA 03
44	BITUNG RAYA 04

Rincian evaluasi keanggotaan (nama perusahaan) berdasarkan *Fisheries Improvement Program* (FIP) yang telah dilaksanakan:

AKTIVITAS / TUGAS	OUTPUT DAN INDIKATOR UNTUK AKTIVITAS/TUGAS	DETAIL AKTIVITAS (untuk anggota Seafood Savers)	PEMIMPIN AKTIVITAS & MITRA	Tahapan SEAFOOD SAVERS		HASIL EVALUASI	RENCANA LANJUT
				INTERMEDIATE	ADVANCE		
<b>1. TATA KELOLA DAN DEFINISI DARI OBJEKTIF PENGELOLAAN PERIKANAN NASIONAL</b>							
1.1. Memperjelas objektif untuk memastikan bahwa prioritas diberikan pada perikanan berkelanjutan dan pengelolaan perikanan berbasis lestari pada	Mekanisme untuk memperluas hukum pada saat ini untuk memprioritaskan keberlanjutan dari perikanan, ketimbang objektif produksi dan perumbuhan, dan mengakomodasi prinsip PAFM dan EAFM	1.1.1 Memfasilitasi proses perkembangan dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan berkelanjutan	SDI, P4KSI			Belum dilaksanakan sepenuhnya	EAFM untuk tuna telah di antara Seko Perikanan, J WWF-Indon presentasik Simposium 2014

		<p>1.1.2. Mengembangkan peraturan perusahaan untuk mendukung implementasi dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan berkelanjutan</p>	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	EAFM untuk tuna telah dilakukan antara Seko Perikanan, J WWF-Indon presentasik Simposium 2014
1.2. Perpanjangan dari system pengelolaan pada tingkat lokal	Seluruh prinsip pengelolaan perikanan, termasuk pendekatan pencegahan, harus diperluas ke tingkat kabupaten dan provinsi	1.2.1 Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai intrepertasi dari peraturan kementerian terkait rencana pengelolaan yang mencakup Harvest Control Rule	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, PSDP			Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Sendangbiru telah melaksanakan kegiatan pengisian logbook untuk nelayan tuna	<p>pengisian in logbook bel terstandaris baik. Banya pengisian je masih diisik nama lokal menggunak setempat</p> <p>rekomenda</p> <p>Membangu pengisian, n pihak dinas setempat d kementerian perikanan</p>

		<p>1.2.2. Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur pada rencana pengelolaan perikanan Provinsi/kabupaten sebagai patron dari perkembangan dan implementasi di area tersebut. Rencana tersebut harus memiliki harvest control rule yang mencakup prinsip perikanan berkelanjutan contoh: ukuran tangkap minimum, menyesuaikan jumlah usaha dengan kapasitas stok</p>	Perusahaan			<p>Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Sendangbiru telah melaksanakan kegiatan pengisian logbook untuk nelayan tuna</p>	<p>pengisian in logbook bel terstandaris baik. Banya pengisian je masih diisik nama lokal menggunak setempat</p> <p>rekomenda</p> <p>Membangu pengisian, n pihak dinas setempat d kementerian perikanan</p>
		<p>1.2.3. Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai perpanjangan dari regulasi EAFM dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan</p>	SDI, DKP Provinsi & Kabupaten			<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>EAFM untu tuna telah c antara Seko Perikanan, J WWF-Indon presentasik Simposium 2014</p>

		<p>1.2.4 Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur di guideline EAFM Indonesia dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan sebagai patron dari pengembangan dan implementasi dari EAFM di tingkat Provinsi/Kabupaten</p>	Perusahaan		Belum dilaksanakan sepenuhnya	<p>EAFM untuk tuna telah dilakukan antara Seko Perikanan, J WWF-Indonesia presentasikan Simposium 2014</p>



1.3. Indonesia menjadi anggota penuh dari WCPFC dan bersifat instrumental dalam memformulasikan kebijakan pencegahan pada RFMOs dan implementasi keputusan	Untuk meneruskan proses untuk menjadi anggota penuh WCPFC	1.3.1. Perusahaan secara proaktif mendukung Indonesia untuk menjadi anggota WCPFC (e.g. mengirimkan surat kepada MMAF, menghadiri pertemuan WCPFC apabila diperlukan	Perusahaan			Belum sepenuhnya dilaksanakan	Sejauh ini PT Makmur aktif melakukan aktivitas yang dilaksanakan terutama jilid kunjungan dan keterbukaan membagi informasi kepada stakeholder
		1.3.2. Memonitor dan menyediakan dukungan untuk memastikan kelanjutan proses dari kenggotaan Indonesia dalam WCPFC	KKP (SDI, P4KSI, PUSKITA), KTI, KEMLU, SetKab			-	Indonesia telah menjadi anggota penuh WCPFC.  Selain itu PT Makmur telah menjadi keanggotaan dari Indian Ocean Commission
	Secara aktif berpartisipasi dalam proses pengadopsian kebijakan pencegahan pada pengelolaan perikanan dalam RFMO	1.3.3. Memastikan prinsip pencegahan diadopsi dalam regulasi nasional (e.g. peraturan kementerian, rencana pengelolaan perikanan)	SDI, P4KSI				Belum dilaksanakan sepenuhnya

		1.3.4. Mempromosikan pengadopsian prinsip pencegahan dalam RFMO mengikuti konvensi-konvensi internasional	SDI, P4KSI, PLN			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Permen 12/30/2012 me kewajiban n ikan hiu sec tidak senga di perairan lepas
	Secara teratur menghadiri pertemuan	1.3.5. Indonesia mempersiapkan laporan dan menghadiri pertemuan WCPFC and RFMOs lain yang relevan	SDI, P4KSI			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia m wakil dalam pertemuan Ocean dan
1.4. Pengembangan rencana pengelolaan perikanan spesifik	Definisi dari target dan objektif, kepatuhan pada konvensi RFMO, implementasi alat nasional dan HCRs (lihat juga 3.4), implementasi langkah pengelolaan pencegahan, mengembangkan strategi mitigasi bycatch (3.5), mengaplikasikan MCS, dan meninjau ulang strategi	1.4.1 Pengembangan dokumen pengelolaan Tuna sesuai dengan rekomendasi FIP	SDI, P4KSI, PUP, PSDP, KTI dan stakeholder lainnya (ASTUIN, ATLI, DKP Provinsi dan Kabupaten, dll) dan WWF/SFP.			Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aks untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkna 2015
		1.4.2 Adopsi dari prinsip pengelolaan tuna ke dalam rencana pengelolaan perikanan berbasis area yang sudah ada	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten			Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aks untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015)

						diterbitkan 2015	
		1.4.3 Perusahaan secara proaktif mendukung dan mengimplementasikan rencana pengelolaan perikanan (e.g. menyediakan surat mengenai rencana pengelolaan, secara proaktif menghadiri pertemuan apabila dibutuhkan)	Perusahaan			Belum sepenuhnya dilaksanakan	Sejauh ini P Makmur ak aktivitas yan dilaksana terutama jil kunjungan o keterbukaan membagi in kepada stake
<b>2. PENGUATAN KERANGKA KERJA INSTITUSIONAL</b>							
2.1. Proses pengambilan keputusan dan konsultasi di konsolidasi melalui FKPPS dan Komite Pengelolaan Tuna, yang mengimplementasikan strategi pengelolaan pada perairan	Melegalisasi FKPPS dan Komite Pengelolaan sebagai institusi apex formal untuk peran pengelolaan perikanan Indonesia sebagaimana didefinisikan	2.1.1 Memfasilitasi ketersediaan regulasi (e.g. peraturan kementerian) yang mendukung FKPPS dan otoritas pengelolaan nasional (e.g. KTI, satuan tugas) untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,			Belum dilaksanakan sepenuhnya	FKPPS sudah masih bersi (volunteran ada keputus mengikat da pertemuan

territorial, archipelagic dan EEZ		2.1.2 Memonitor dan mengevaluasi kinerja FKPPS dan/atau otoritas pengelolaan nasional (e.g. KTI, task force) yang dilaksanakan oleh instansi KKP baik internal maupun eksternal untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan tuna	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,			Belum dilaksanakan sepenuhnya	FKPPS sudah masih bersi (volunterar ada keputus mengikat da pertemuan
	Keputusan diimplementasikan secara sentral. Provinsi dan Kabupaten mengimplementasikan kebijakan, namun tidak bertanggung jawab atas memformulasikan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan syarat pengelolaan nasional	2.1.3 Memfasilitasi pembentukan otoritas untuk mengimplementasikan langkah-langkah pada rencana pengelolaan perikanan berbasis area (RPP WPP) di tingkat Provinsi/Kabupaten	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,			Belum dilaksanakan sepenuhnya	FKPPS sudah masih bersi (volunterar ada keputus mengikat da pertemuan
		2.1.4 Memonitor dan mengevaluasi kinerja FKPPS dan/atau otoritas pengelolaan nasional (e.g. KTI, task force) yang dilaksanakan oleh instansi KKP baik internal maupun eksternal untuk	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,			Belum dilaksanakan sepenuhnya	FKPPS sudah masih bersi (volunterar ada keputus mengikat da pertemuan

		bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan tuna				
Memungkinkan keterlibatan aktif dari stakeholders dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan	2.1.5 Secara aktif melibatkan industry, instansi penelitian, LSM dalam pertemuan terkait pengambilan keputusan perikanan	SDI, P4KSI, PUP, PSDP, KTI dan stakeholder lainnya (ASTUIN, ATLI, DKP Provinsi dan Kabupaten, dll)			Belum sepenuhnya dilaksanakan	Sejauh ini P Makmur ak aktivitas yan dilaksanakan terutama jil kunjungan o keterbukaan membagi in kepada stak
	2.1.6 Perusahaan secara proaktif mendukung dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat provinsi/kabupaten dan nasional (e.g menghadiri pertemuan)	Perusahaan			Belum sepenuhnya dilaksanakan	Sejauh ini P Makmur ak aktivitas yan dilaksanakan terutama jil kunjungan o keterbukaan membagi in kepada stak

<p>2.2. Identifikasi tanggung jawab dan peningkatan kapasitas pada badan-badan pelaksana</p>	<p>Allokasi tugas pada pemangku kepentingan spesifik, Satker Perikanan Tuna, KKP, DKP Provinsi dan Kabupaten serta kelompok komunitas</p>	<p>2.2.1 Memfasilitasi ketersediaan regulasi (peraturan kementerian, peraturan direktorat jenderal dll) mengenai alokasi tugas dengan deskripsi pekerjaan spesifik pada instansi yang tebat dan relevan untuk mendukung pengelolaan perikanan</p>	<p>SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder, sebagaimana dijelaskan d atas.</p>			<p>Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Sendangbiru telah melaksanakan kegiatan pengisian logbook untuk nelayan tuna</p>	<p>pengisian in logbook bel terstandaris baik. Banya pengisian je masih diisik nama lokal menggunak setempat</p> <p>rekomenda Membangu pengisian, n pihak dinas setempat d kementerian perikanan</p>
<p><b>3. AKTIVITAS PENELITIAN</b></p>							
<p>3.1. Penguatan kapasitas National scientific stock assessment untuk mendukung pegelolaan yang memperhitungkan factor biologis</p>	<p>Peningkatan kapasitas SDN untuk stock assessment dan pembangunan unit penelitian spesifik untuk region di Benoa dan Bitung</p>	<p>3.1.1 Lokakarya mengidentifikasi dan memastikan bahwa otoritas yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis stock assessment teah diperkuat dan metodologi untuk</p>	<p>P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN, BPSDM.</p>			<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>rencana aks untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkna 2015</p>

		assessment disetujui secara bersama (yang juga mencakup kebutuhan untuk MSC)					
		3.1.2 Pelatihan mengenai stock assessment, biologis perikanan dan kapasitas penangkapan ikan	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN, BPSDM.			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia m (Balitbang K LOKA Tuna nmengikuti melakukan serta melap RFMO
3.2. Indonesia memperkuat komitmennya terhadap pengumpulan dan kolasi data, terutama dalam bentuk struktur stok, kelimpahan stok, dan komposisi armada	Kelimpahan stok, komposisi armada, produktivitas stok dan struktur stok	3.2.1 Pengembangan modul metodologi sampling dan pelaksanaan pelatihan mengenai kelimpahan stok tuna, komposisi armada, produktivitas stok dan struktur stok	P4KSI, BPPL, SDI			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia m (Balitbang K LOKA Tuna nmengikuti melakukan serta melap RFMO

	<p>3.2.2 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengumpulan data tuna dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas produksi mereka</p>	<p>P4KSI, BPPL, SDI, industri (langsung dan via asosiasi industri)</p>			<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>Indonesia m (Balitbang K LOKA Tuna nmengikuti melakukan serta melap RFMO</p>
	<p>3.2.3 Penelitian mengenai kelimpahan stok tuna, komposisi armada, produktivitas stok dan struktur stok menggunakan metodologi yang disetujui</p>	<p>P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN</p>			<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>Indonesia m (Balitbang K LOKA Tuna nmengikuti melakukan serta melap RFMO</p>
	<p>3.2.4 Meningkatkan aktifitas penelitian dari institute penelitian tuna hindia di Benoa, dan mendorong pembangunan institute serupa di Bitung</p>	<p>P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN</p>			<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>Indonesia m (Balitbang K LOKA Tuna nmengikuti melakukan serta melap RFMO</p>



3.3. Indonesia perlu mengadopsi LRP nya sendiri berdasarkan nasihat RFMO dan nasional agar stok yang dijaga di atas tingkat biomass menyediakan poin keuntungan berkelanjutan maksimal	Penguatan stock assessment (YFT, SKJ, BET dan lain-lain)	3.3.1 Melaksanakan stock assessment untuk tuna (YFT, SKJ, BET dll)	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN			Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkan 2015  Indonesia a membangun nasional. Se dari CSIRO (
		3.3.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data tuna dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas produks mereka (e.g. Logbook, onboard observer, gonad sampling, data tangkapan tahunan, dll)	P4KSI, BPPL, SDI, industry (langsung dan via asosiasi industri)			Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkan 2015  Indonesia a membangun nasional. Se dari CSIRO (
	Mengatur tingkat Level Reference Points	3.3.3 Mengembangkan draft level Reference	P4KSI, BPPL, KOMNAS			Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi untuk Tuna

	nasional untuk masing-masing spesies	Points nasional untuk masing-masing spesies tuna	KAJISKAN, SDI			Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkan 2015 Indonesia a membangun nasional. Se dari CSIRO (
		3.3.4 Membangun regulasi pada level Reference Points nasional untuk masing-masing spesies tuna	P4KSI, SDI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aks untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkan 2015 Indonesia a membangun nasional. Se dari CSIRO (
	Merekomendasikan ke WCPFC dan IOTC untuk memiliki LRP regional	3.3.5 Mengembangkan kebijakan mengenai regional LRP yang diatur berdasarkan kapasitas daya dukung biologis	SDI, WWF		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aks untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015)

						diterbitkna 2015	
		3.3.6 Secara proaktif mengadvokasikan WCPFC dan IOTC untuk memiliki LRP regional	SDI, P4KSI, KTI, WWF			Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aks untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkna 2015  Indonesia a membangu nasional.
3.4. Strategi panen formal diadopsi untuk tuna Samudera Hindia dan Pasifik Indonesia yang dihubungkan dengan (Nasional atau RFMO) Limit Reference Points, yang mencakup semua rentang perikanan (termasuk < 30 GT adan 5 GT). Objek haruslah konsisten dengan nasihat RFMO,	KKP mengembangkan Harvest Strategy yang dihubungkan dengan CMM 2008-01 untuk aktivitas EEZ/YFT dan BET dan membatasi usaha pada level 2001-2004, sebagai tambahan untuk langkah-langkah yang diambil (i.e kontrol usaha/ pengurangan kapasitas di perairan territorial/archipelagic	3.4.1 Mendukung P4KSI dalam pengembangan karya ilmiah yang memperhitungkan sumber daya tuna dan perikanan sebagai basis dalam mengembangkan dokumen kebijakan	SDI, FKKP, KTI			Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aks untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkna 2015  Indonesia a membangu nasional. Se dari CSIRO (

<p>untuk kasus Pasifik, adalah untuk membatasi usaha penangkapan pada level 2004, dan untuk mengurangi usaha pada YFT dan BET sebesar 30%</p>	<p>apabila interaksi dengan juvenil YFT/BET bersifat signifikan</p>	<p>3.4.2 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP mengembangkan Harvest Strategy yang dihubungkan ke CMM 2008-01 untuk aktivitas EEZ/YFT dan BET dan pengetatan pada usaha yang ditentukan sesuai dengan level 2001-2004, sebagai tambahan untuk langkah-langkah yang diambil (i.e kontrol usaha/ pengurangan kapasitas di perairan territorial/archipelagic apabila interaksi dengan juvenil YFT/BET bersifat signifikan</p>	<p>SDI, FKPP, KTI</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>rencana aksi untuk Tuna Tongkol.ter (107/ 2015) diterbitkan 2015</p> <p>Indonesia akan membangun nasional. Se dari CSIRO (</p>
<p>3.5. Rencana pengelolaan perikanan spesifik ditetapkan mencakup peraturan kontrol yang didefinisikan secara baik dalam membatasi usaha (dengan perijinan entri yang ketat, terutama pada</p>	<p>Mengembangkan rencana pengelolaan perikanan spesifik (rencana pengelolaan perikanan nasional untuk Tuna)</p>	<p>3.5.1 Memfasilitasi proses pengembangan regulasi pengelolaan Tuna di Indonesia yang mengatur HCR, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, pengetatan perijinan entri pada tingkat provinsi, mengurangi</p>	<p>SDI, P4KSI, DKP Provinsi &amp; Kabupaten, PLN, KKJI, PSDP</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>rencana aksi untuk Tuna Tongkol.ter (107/ 2015) diterbitkan 2015</p>

<p>tingkat provinsi) dan efek dari BET juvenil (pengetatan pada penggunaan FADs (pada seluruh tingkatan pemerintahan), meningkatkan ukuran minimal jarring, area tertutup, dan lain-lain). Alat yang digunakan harus memperhitungkan ketidakpastian</p>		<p>efek dari BET juvenil (melalui, contoh: pengetatan pada penggunaan FADs (pada seluruh tingkatan pemerintahan), meningkatkan ukuran minimal jarring, area tertutup, dan lain-lain). Alat yang digunakan harus memperhitungkan ketidakpastian</p>				<p>Indonesia a membangu nasional. Se dari CSIRO (</p>
		<p>3.5.2 Partisipasi perusahaan untuk mendukung rencana pengelolaan tuna yang menyebutkan Harvest Control Rule e.g. batas ukuran minimal, menyesuaikan jumlah usaha dengan daya dukung dan regulasi, mengikuti semua perijinan perikanan, FADs; penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; menangkap ikan di lokasi yang tepat, dll</p>	<p>Perusahaan</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>Belum ada p PT. Hatindo rantai perda untuk keter dalam aktiv langkah ini nasional da</p>

3.6. Pengumpulan data bycatch	Tinjauan ulang dari informasi yang tersedia mengenai status stok, termasuk perikanan umpan, hiu, marlin, dan species pelagis utama lainnya	3.6.1 Tinjauan ulang dari informasi yang tersedia mengenai status stok, termasuk perikanan umpan, hiu, marlin, dan species pelagis utama lainnya	P4KSI, KOMNAS KAJISKAN			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Pencatatan di perikanan skala kecil E dilaksanakan
		3.6.2 Perusahaan menyediakan informasi mengenai status stok, termasuk perikanan umpan, hiu, marlin, dan species pelagis utama lainnya (cth: via log book dan/atau formulir penelitian)	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Pencatatan di perikanan skala kecil E dilaksanakan di tingkat na perusahaan
	Pengembangan modul pelatihan observasi (dari contoh WWF/SPC) dan pelatihan observer	3.6.3 Memperbaiki modul pelatihan observer/enumerator yang sudah ada, terutama mengenai laporan data bycatch (Data yang sudah ada perlu lebih rinci)	P4KSI, BPPL, SDI, industri, WWF/NGO, Universitas, SPC			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Pencatatan di perikanan skala kecil E dilaksanakan di tingkat na perusahaan

		3.6.4. Perusahaan mengimplementasikan program observer untuk armadanya	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Pencatatan di perikanan skala kecil E dilaksanakan di tingkat perusahaan
	Mewajibkan monitoring kepadatan kumpulan ikan dan ukuran dari rumpon secara periodic untuk menentukan dampak pada spesies ikan lain yang tercakup dalam aktivitas.	3.6.5. Melakukan studi dan monitoring pada status dan dampak dari kepadatan kumpulan ikan, ukuran, dan spesies ikan lain yang tercakup dalam aktivitas pada rumpon	P4KSI, BPPL, SDI, industry, WWF/NGO, universities, SPC			Belum dilaksanakan sepenuhnya	RPP Tuna be dan kebutu Limit Refer dibahas sec Selain itu, p rumpon tela yaitu perme 2004. Namu di lapangan diketahui se ketaatanny

		3.6.6. Perusahaan menyediakan informasi dan melakukan monitoring pada dampak dari rumpon terhadap kepadatan kumpulan ikan, ukuran, dan spesies ikan lain yang tercakup dalam aktivitas.	Perusahaan		Belum dilaksanakan sepenuhnya	RPP Tuna b dan kebutu Limit Refer dibahas sec Selain itu, p rumpon tela yaitu perme 2004. Namu di lapangan diketahui se ketaatanny
Modeling dari penghapusan perikanan untuk menilai dampak pada ekosistem menggunakan SPC tools – ECOPATH dll		3.6.7. Mendorong RFMO untuk melakukan modeling dari penghapusan perikanan untukto menilai dampak pada ekosistem menggunakan SPC tools – ECOPATH dll	P4KSI, SPC, CSIRO		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum ada ecosystem y digunakan s



<p>3.7. Penyelesaian kerangka berbasis resiko untuk retained species dan bycatch (Cakalang, Tuna species kecil, mahimahi, kawakawa dan hiu) dan ikan umpan. Membutuhkan peneliti independen untuk mengumpulkan informasi kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan pendekatan berbasis resiko yang mencakup SICA dan PSA</p>	<p>Pemangku kepentingan menerima pelatihan penilaian resiko dan berpartisipasi dalam workshop mengenai metode spesifik untuk menentukan resiko terhadap spesies non target</p>	<p>3.7.1 Melakukan pelatihan penilaian resiko dan berpartisipasi dalam workshop mengenai metode spesifik untuk menentukan resiko terhadap spesies non target pada pemangku kepentingan</p>	<p>P4KSI, BPPL, SDI, PSDP, industry, WWF/NGO, University, multi-stakeholder involvement, RFMOs, external research bodies</p>			<p>WWF-ID bekerjasama dengan FPIK-IPB untuk melakukan RBF dengan menggunakan PSA dari MSC</p>	<p>Hasil penilaian kurang baik diperbaiki. RBF dapat o unit sertifik</p>
	<p>Diambil dari informasi 4.1 dan melakukan risk assessment/ penilaian resiko</p>	<p>3.7.2 Melakukan penilaian berbasis resiko untuk menentukan resiko terhadap spesies non target</p>	<p>P4KSI, BPPL</p>			<p>WWF-ID bekerjasama dengan FPIK-IPB untuk melakukan RBF dengan menggunakan PSA dari MSC</p>	<p>Hasil penilaian kurang baik diperbaiki. RBF dapat o unit sertifik</p>
		<p>3.7.3 Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk Risk Based Assessment untuk menentukan resiko terhadap spesies non target</p>	<p>Perusahaan</p>			<p>WWF-ID bekerjasama dengan FPIK-IPB untuk melakukan RBF dengan menggunakan PSA dari MSC</p>	<p>Hasil penilaian kurang baik diperbaiki. RBF dapat o unit sertifik</p>
		<p>3.7.4 Mengembangkan strategi menggunakan data dari RBA untuk evaluasi MSC</p>	<p>P4KSI, BPPL, WWF</p>			<p>WWF-ID bekerjasama dengan FPIK-IPB untuk melakukan RBF dengan menggunakan PSA dari MSC</p>	<p>Hasil penilaian kurang baik diperbaiki. RBF dapat o unit sertifik</p>

3.8. Batas nasional untuk interaksi ETP ditentukan dan data independen dikumpulkan pada batas ETP untuk memastikan bahwa bycatch tercakup dalam persyaratan internasional dan nasional. Aktivitas mungkin butuh melibatkan observer untuk ditempatkan di seluruh rentang perikanan	NPOA difinalisasi untuk memperhitungkan WCPFC CMMs (hiu, penyu, setasea dan burung)	3.8.1 Mengembangkan NPOA dari spesies ETP di Indonesia (hiu, penyu, setasea dan burung)	SDI, FKPPS, KTI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Beluma ada mengenai p bycatch di n (kecuali Per
		3.8.2 Perusahaan menyediakan informasi dan mengimplementasikan NPOA dari spesies ETP di Indonesia (hiu, penyu, setasea dan burung)	Perusahaan		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aks untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkna 2015 di dalamnya Indonesia a membangun bycatch
3.9. Strategi pengelolaan dan mitigasi	Mengembangkan strategi penglolan untuk species bycatch dan baitfish untuk digabungkan ke dalam rencana pengelolaan (1.4)	3.9.1 P4KSI akan menyediakan karya ilmiah terkait sumberdaya tuna dan perikanan sebagai dasar dalam mengembangkan dokumen kebijakan	SDI, FKPPS, KTI, KAPI, P4KSI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aks untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkna 2015

						di dalamnya Indonesia a membangun bycatch
		3.9.2 Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan karya ilmiah mengenai strategi pengelolaan dan dokumen mitigasi untuk perikanan bycatch dan ikan umpan	Perusahaan			rencana aksi untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkan 2015. Di da Indonesia a membangun bycatch  Beluma ada strategi per ikan umpan
		3.9.3 Direktorat pengelolaan sumber daya perikanan tangkap DG akan mengembangkan strategi pengelolaan dan dokumen mitigasi untuk perikanan bycatch dan ikan umpan	SDI, KAPI, P4KSI			rencana aksi untuk Tuna Tongkol.ter 107/ 2015) diterbitkan 2015. Di da Indonesia a membangun bycatch  Belum dilaksanakan sepenuhnya

						Beluma ada strategi perikanan umpan	
		3.9.4 Perusahaan memiliki kebijakan untuk mendukung strategi pengelolaan dan dokumen mitigasi untuk perikanan bycatch dan ikan umpan	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Beluma ada strategi dan pemanfaatan ikan umpan
3.10. Rencana Penelitian Indonesia dipersiapkan untuk memperhitungkan permintaan nasional dan internasional dan kewajiban dengan biaya yang semestinya dialokasikan dari industri, pemerintah dan donor	Mengumpulkan informasi untuk menentukan celah pada data, fokus taktis pada stok target yang kritis (dan tidak terbatas pada proses review FMA yang sedang berlangsung), Cost effective risk assessment ditanamkan kedalam analytical tools, aplikasi dari model ekosistem, pembangunan kapasitas untuk mendukung hal-hal di	3.10.1 Workshop mengenai informasi untuk menentukan celah pada data, fokus taktis pada stok target yang kritis (dan tidak terbatas pada proses review FMA yang sedang berlangsung), Cost effective risk assessment ditanamkan kedalam analytical tools, aplikasi dari model ekosistem, pembangunan kapasitas untuk mendukung hal-hal di	P4KSI, (BPPL.,BBRSE, KAPI)			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Sejauh ini P Makmur ak aktivitas yan dilaksana terutama jil kunjungan o keterbukaan membagi in kepada stake

	atas, peningkatan kesadaran dari aktivitas yang akan dilaksanakan dan review periodik (termasuk sebagai bahan untuk dinilai oleh pihak external).	atas, peningkatan kesadaran dari aktivitas yang akan dilaksanakan dan review periodik (termasuk sebagai bahan untuk dinilai oleh pihak external).					
		3.10.2 Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk workshop tersebut	Perusahaan			Belum sepenuhnya dilaksanakan	Sejauh ini P Makmur ak aktivitas yan dilaksana terutama jil kunjungan o keterbukaan membagi in kepada stak
	Mencari kerjasama dengan SPC/CSIRO terkait pengumpulan data ekosistem	3.10.3 P4KSI membentuk kerjasama dengan SPC/CSIRO terkait pengumpulan data ekosistem	P4KSI			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia m (Balitbang K LOKA Tuna nmengikuti melakukan serta melap RFMO
	Memasukan peningkatan kesadaran dari rencana penelitian untuk memperbaiki tingkat pemahaman dari pemangku	3.10.4 Melibatkan pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten pada sosialisasi dan implementasi	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, KKJI, PSDP			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan ter ini Belum di sepenuhnya

kepentingan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten	3.10.5 Membagi hasil dari penelitian ke tingkat nasional dan kabupaten	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, KKJI, PSDP			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan te ini Belum di sepenuhnya
	3.10.6 Perusahaan terlibat dalam penelitian	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan te ini Belum di sepenuhnya
Mengeksten proses tinjauan lang internal (cth: penelitian, pengelolaan) menggabungkan input dari tingkat provinsi dan kabupaten	3.10.7 Mengeksten proses tinjauan lang internal (cth: penelitian, pengelolaan) menggabungkan input dari tingkat provinsi dan kabupaten	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan te ini Belum di sepenuhnya
Untuk merencanakan proses tinjauan ulang eksternal, serta monitoring dan implementasi dari rencana tersebut	3.10.8 Untuk merencanakan proses tinjauan ulang eksternal, serta monitoring dan implementasi dari rencana tersebut	BPK, KTI			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan te ini Belum di sepenuhnya

#### 4. PENGUATAN KEPATUHAN

4.1. Implementasi aksi kepatuhan berdasarkan risk analysis dan menentukan bentuk penegakan prioritas pada seluruh rentang perikanan tuna	Rencana kepatuhan dikembangkan bersama dengan otoritas nasional, provinsi, dan kabupaten serta organisasi komunitas	4.1.1 Menginiasi pengembangan dari peraturan kepatuhan (termasuk aktivitas, mitra, dan biaya) mengikutsertakan otoritas nasional, provinsi, dan kabupaten serta organisasi komunitas	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten / POKMAS		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum teri kelompok y dijadikan pi POKMASWA
		4.1.2 Disseminasi rencana kepatuhan untuk perikanan tuna	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten / POKMAS, associations		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum teri kelompok y dijadikan pi POKMASWA
		4.1.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan yang memastikan adopsi dan implementasi dari rencana tersebut	Perusahaan		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum teri kelompok y dijadikan pi POKMASWA
4.2. Memperkuat legislasi pada sanksi	pelanggaran yang sudah ada untuk diperhitungkan dalam proses langkah pengelolaan pada perikanan (EEZ, archipelagic dan coastal)	4.2.1 Memfasilitasi pemerintah dalam memperbaiki sanksi dari peraturan, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum	PSDP/MMAF Legal Department		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan t pelaksanaan dan hukum diberikan b

		4.2.2 Sosialisasi dari legislasi mengenai sangsi untuk pemangku kepentingan dari perikanan ikan karang	PSDP/MMAF Legal Department, associations			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan t pelaksanaan dan hukuman diberikan b
		4.2.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai implementasi dari legislasi	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan t pelaksanaan dan hukuman diberikan b
4.3. Proses edukasi bagi nelayan untuk langkah pengelolaan untuk spesies target, reduksi bycatch, dan konsekuensi dari interaksi ekosistem	Diperluas ke jaringan POKMASWAS. Membutuhkan pembelian yang cukup dari pengepul dan pengolah.	4.3.1 Pelatihan mengenai langkah-langkah pengelolaan (cth: spesies target, reduksi bycatch, dan konsekuensi dari interaksi ekosistem) untuk nelayan: - menggunakan BMP untuk praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan - menggunakan BMP untuk meningkatkan kualitas ikan agar mengurangi	PSDP, BPSDM KP, SDI, P4KSI, KAPI, DKP Provinsi & Kabupaten, Proesor, pengepul dan WWF.			<p>Pelatihan BMP Tuna Handline, Sendangbiru, 2 November 2015</p> <p>Peserta yang hadir merupakan nelayan, Pengepul, KUD Minajaya Sendangbiru, pengawas perikanan, Polair, dan Satuan tugas angkatan laut. Dengan jumlah total peserta pelatihan (berdasarkan absensi) sebanyak 27 orang.</p> <p>Info mengenai kegiatan dapat dilihat di:  <a href="http://www.seafoodsavers.org/news/read/Langkah-awal-PT-Hatindo-Sukses%20Makmur-dan-PT-168-Benoa-Sebagai-Anggota-Seafood-Savers">http://www.seafoodsavers.org/news/read/Langkah-awal-PT-Hatindo-Sukses%20Makmur-dan-PT-168-Benoa-Sebagai-Anggota-Seafood-Savers</a></p>	Perusahaan harus mema perikanan d menerapkan yang disamp pelatihan. U selanjutnya monitor set dari pelaksa pelatihan



		<i>overfishing</i> - menggunakan BMP untuk mitigasi bycatch - Catatan keterlacakan				
		4.3.2 Memastikan nelayan melaksanakan aktivitas penangkapan ikan yang berkelanjutan, sesuai dengan materi pelatihan 4.3.1	Perusahaan			Pelatihan Tuna BMP telah dilaksanakan.  Memastikan penerapan perbaikan dan oleh pengep
4.4. Memperkuat system pengelolaan berbasis komunitas untuk perikanan hand-line dan perikanan pesisir lainnya.	Sistem dapat dikatakan telah ada, tetapi membutuhkan penguatan dari fungsi-fungsi dan dukungan PokMasWas.	4.4.1 Memfasilitasi pembentukan PokMasWas, yang dipersiapkan dengan pengawasan dan rencana monitoring untuk praktik penangkapan ikan (termasuk peningkatan kapasitas dan penguatan institusional)	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten, stakeholder			Belum terici kelompok y dijadikan pi POKMASWA
		4.4.2 Memonitor kinerja PokMasWas	PSDP, DKP Provinsi &			Belum terici kelompok y

		sebagai bagian dari system pengelolaan	Kabupaten, stakeholder				dijadikan pi POKMASWA
		4.4.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan untuk mendukung pembentukan dan operasional dari PokMasWas	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum teri kelompok y dijadikan pi POKMASWA
4.5. Laporan identifikasi pelanggaran yang terdeteksi dipersiapkan dan tersedia bagi public.	Mempersiapkan laporan identifikasi hasil inspeksi aktivitas, terutama aktivitas terkait penangkapan ikan	4.5.1 Memfasilitasi pengumpulan laporan kepatuhan regulasi	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan t pelaksanaan dan hukum diberikan b
		4.5.2 Memfasilitasi pengunggahan laporan ke situs KKP	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan t pelaksanaan dan hukum diberikan b

		4.5.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai pengumpulan data pendukung dan persiapan laporan pelanggaran regulasi	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan t pelaksanaan dan hukum diberikan b
4.6. Melatih dan memperbaiki efektifitas dari petugas penegakan peraturan dan menambahkan perangkat keras pendukung	Memperbaiki program pelatihan PSDP yang sudah ada, namun diperluas ke partisipasi Provinsi dan kabupaten	4.6.1 Pelatihan pengawasan ke PokMasWas dan PSDP di Provinsi dan Kabupaten	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan t pelaksanaan dan hukum diberikan b
		4.6.2 Memfasilitasi sinkronisasi workplan dengan stakeholder pengawasan lain untuk memperbaiki aktivitas pengawasan dan penegakan	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten, stakeholder			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan t pelaksanaan dan hukum diberikan b
		4.6.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai petugas penegakan pendukung di lapangan	Perusahaan				Peraturan t pelaksanaan dan hukum diberikan b

